



tersedianya dua pilihan program kelas yang disesuaikan dengan berat ringannya kelainan yang dialami PDBK, yakni bagi PDBK tingkat ringan, mengikuti program pendidikan kelas inklusi, sedangkan bagi PDBK tingkat berat mengikuti program pendidikan di kelas khusus atau di “ruang pintar”. Sekolah juga melakukan modifikasi kurikulum dengan menggunakan pendekatan program pendekatan individual (PPI). Untuk mengevaluasi atau mengontrol terselenggaranya KBM yang baik dan efisien baik Guru umum dan GPK menyusun form penilaian yang setiap satu bulan sekali dan direkap hasilnya dalam bentuk deskripsi yang kemudian diserahkan ke sekolah.

2. Manajemen kurikulum baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian dimulai dengan perencanaan pada saat kegiatan PPDB bagi peserta didik reguler, bagi PDBK dengan ditambah melakukan identifikasi melalui asesmen yang dimiliki PDBK untuk selanjutnya dapat merumuskan penyusunan 1). Analisis mata pelajaran (AMP), 2). Kalender Akademik, 3). Penyusunan Program Tahunan (PROTA), 4). Penyusunan Program Semester (PROMES), 5). Program Satuan Pelajaran, dan 6). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam mengelola proses KBM baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK kepala sekolah mampu menciptakan suasana sekolah yang harmonis sehingga tercipta kerja sama yang baik antara guru wali kelas, guru BK, GPK dan peserta didik reguler untuk membuat PDBK juga tetap merasa nyaman. Pelaksanaan KBM di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian menggunakan kurikulum 2013 baik bagi peserta didik

reguler maupun bagi PDBK, hanya saja pada PDBK sekolah melakukan beberapa modifikasi, meskipun dalam praktiknya PDBK banyak menghabiskan waktu belajarnya dikelas inklusi bersamaan dengan peserta didik reguler lainnya. Titik berat tujuan sekolah berbasis inklusi di SMPN 3 Krian ini adalah agar siswa berkebutuhan khusus mampu bersosialisasi dengan siswa didik reguler yang lain. Pihak sekolah melakukan evaluasi selain dengan berkerja sama dengan guru mata pelajaran atau guru wali kelas, juga bekerja sama dengan UPTD inklusi kabupaten Sidoarjo untuk evaluasi terhadap KBM bagi PDBK.

3. Terdapat perbedaan dan persamaan akan manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian. Perbedaan tersebut terlihat dari pelaksanaan kurikulum 2013 bagi PDBK di sekolah inklusi. Dimana pada SMP Negeri 29 Surabaya tersedia dua pilihan program pendidikan kelas yang disesuaikan dengan tingkat berat ringannya kelainan yang dialami PDBK. Sedangkan Sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian hanya tersedia program pendidikan di kelas inklusi dimana setiap kali pembelajarannya PDBK selalu berada sama dengan peserta didik reguler lainnya. Namun demikian antara dua sekolah berbasis inklusi ini juga memiliki kesamaan dalam hal manajemen kurikulumnya dimana untuk menentukan penanganan terhadap PDBK sekolah menggunakan pendekatan kurikulum PPI dan modifikasi. Sama dalam tahap manajemen kurikulumnya bagi peserta didik reguler yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan,



serta kompetensi pendidikan khusus (PLB) tidak hanya dapat menentukan keberhasilan PDBK untuk mencapai indikator-indikator materi maupun kurikulum yang sesuai dengan hambatan atau ketunaan yang dialami PDBK.

3. Penyediaan sarana prasarana yang dapat menunjang proses KBM baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK, tersedianya ruang sumber khusus bagi PDBK yang memiliki kelengkapan fasilitas bahan dan alat ajar bagi masing-masing ketunaan yang dimiliki PDBK.
4. Sekolah perlu memberi perhatian lebih terhadap pemahaman keadaan sekolah inklusi kepada peserta didik reguler mengenai keberadaan PDBK di lingkungan sekolah agar dapat terjalin kerja sama yang baik pula bagi keberhasilan prestasi baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK di sekolah inklusi.
5. Dinas memberikan perhatian lebih dan melakukan peninjauan ulang mengenai keadaan sekolah setelah ditunjuk sebagai sekolah berbasis inklusi yang berada di daerah tersebut, dengan tidak sepenuhnya membebankan kepada pihak sekolah. Agar PDBK dan GPK juga turut merasakan keadilan dalam melakukan KBM yang layak efektif, efisien, aman, nyaman dan menyenangkan.